

MENGERAKAN MITIGASI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT: BELAJAR DARI PRAKSIS PROGRAM CSR KAMPUNG SAFETY

Maya Desvita Utari

Community Development Officer PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta,
Indonesia

Email: mayadesvitaUtari@gmail.com

Abstrak

Sejak abad ketujuh belas perdebatan mengenai bencana bukan sebagai fenomena alamiah melainkan non-alamiah telah bergulir hingga saat ini. Pandangan tersebut sangat berpengaruh secara literal dan praksis dalam penanganan bencana dan penanganan rekonstruksi pasca-bencana. Dengan menempatkan pandangan yang sama di mana bencana diartikan sebagai fenomena non-alamiah, studi kasus ini menyoroti pembelajaran berharga dari praksis mitigasi bencana yang dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana dalam Program Kampung Safety di Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara. Program tersebut diimplementasikan oleh warga Tugu Selatan bersama dengan mitra utama yakni PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta. Hasil dari studi kasus ini menunjukkan, *pertama*, warga Tugu Selatan telah memiliki pandangan bahwa serangkaian bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, hingga krisis pangan bukan semata fenomena alamiah. Sebab, serangkaian bencana tersebut selain kedatangannya sering diperparah oleh campur tangan manusia, namun juga bencana tersebut berdampak langsung pada kehidupan manusia. *Kedua*, untuk mengurai persoalan bencana tersebut masyarakat Tugu Selatan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam payung program Kampung Safety. *Ketiga*, berbagai kegiatan dalam program tersebut seperti pelatihan dan simulasi bencana, Warung Siap Siaga, Dapur Darurat, serta *vertical urban farming* yang berkaitan satu sama lain tersebut mencerminkan penanganan bencana yang lebih demokratis dan *bottom-up*. Selain berbagai kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengelola lingkungannya, namun juga proses implementasi kegiatan tersebut mencirikan penanganan bencana dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Bencana, CSR, Kampung Safety, Mitigasi.

Abstract

Since the seventeenth century, the debate about disasters as non-natural but natural phenomena has been ongoing until today. This view has a very significant literal and practical influence on disaster management and post-disaster reconstruction. By placing the same view where disasters are interpreted as non-natural phenomena, this case study highlights valuable lessons from the disaster mitigation practices carried out by the Disaster Preparedness Group in the Kampung Safety Program in Tugu Selatan Village, North Jakarta. The program was implemented by Tugu Selatan residents together with the main partner, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta. The results of this case study show, first, that Tugu Selatan residents have had the view that a series of disasters such as floods, fires, earthquakes, tsunamis, and food crises are not merely natural phenomena. This is because, in addition to their arrival often being exacerbated by human intervention, these disasters also have a direct impact on human life. Second, to unravel the problem of these disasters, the Tugu Selatan community is actively involved in various disaster preparedness activities under the umbrella of the Kampung Safety program. Third, various activities in the program such as disaster

training and simulation, Warung Siap Siaga, Dapur Darurat, and vertical urban farming that are related to each other reflect a more democratic and bottom-up disaster management. In addition to these activities enabling the community to manage their environment, the implementation process of these activities also characterizes disaster management from the community and for the community itself.

Keywords: *Disaster, CSR, Kampung Safety, Mitigation.*

A. PENDAHULUAN

Telah terjadi perbincangan tiada henti bagi para pemikir dan praktisi, mengenai “bencana” yang tidak ditempatkan sebagai peristiwa alamiah melainkan non-alamiah (Dombrowsky, 1995; Kumagai, Edwards and Carroll, 2006; Roberts, 2009). Perbincangan tersebut bukan hal baru namun telah dimulai sejak abad 17 hingga saat ini. Perbincangan yang panjang tersebut juga menandakan bahwa menempatkan bencana bukan sebagai peristiwa alamiah begitu penting. Sebab, selain menimbulkan dilema berkepanjangan pada berbagai wacana literatur, menempatkan bencana sebagai peristiwa alamiah menimbulkan konsekuensi fatal secara praktis, seperti munculnya sikap abai terhadap tanggung jawab moral salah satunya ketika kelalaian berbagai pihak yang mendorong terjadinya bencana menjadi kurang diperhitungkan (Dranseika, 2016; Chmutina and Von Meding, 2019). Sehingga, banyak studi akhir-akhir ini yang melakukan penelitian tentang bencana namun bencana tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang alamiah. Berbagai studi tersebut kemudian juga lebih erat dengan berbagai perbincangan tentang praktis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Pertama studi yang dilakukan oleh Annelies Heijmans (2009) terhadap *Center Disaster Response Center (CDRC)* di Filipina yang bergerak ke masyarakat akar rumput untuk mengkampanyekan bahwa bencana bukan sesuatu yang alamiah. Namun, menurut lembaga tersebut, persoalan kerentanan warga baik sebelum maupun setelah bencana terjadi yang kian memburuk pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah Filipina. Studi *kedua*, dengan argumen yang hampir serupa dilakukan oleh Ali Tahir et al., (2021) di Pakistan Utara. Studi tersebut menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi berbagai lembaga dengan masyarakat adat dalam pengurangan risiko bencana. Namun, sebelum upaya pengurangan risiko tersebut dilakukan, perlu pemahaman dan perluasan pengetahuan kepada masyarakat salah satunya tentang bencana sebagai peristiwa non-alami. Bencana adalah hasil interaksi antara peristiwa alam dengan manusia dan kadang kala kemampuan sosial-ekonomi masyarakat tidak dapat mengatasi hal tersebut (James and Paton, 2015).

Studi *ketiga* dengan nada agak berbeda dilakukan oleh Kevin A. Gould et al. (2016) di Chile. Studi tersebut membahas konsekuensi dari menempatkan bencana sebagai peristiwa alam semata yang kemudian membentuk pandangan tentang dualisme alam/negara. Konsekuensi pandangan dualisme tersebut membuat alam ditempatkan sebagai sesuatu yang perlu dikelola, sedangkan pengelolanya adalah negara. Dualisme tersebut berpengaruh pada penanganan bencana di Chile yang lebih bersifat *top-down* daripada demokratis. Studi *keempat* yang dilakukan oleh Neil Smith (2006) di Amerika Serikat mengungkap hal yang serupa dengan studi Gould et al (2016) tersebut yang mana menempatkan bencana sebagai peristiwa alami memiliki konsekuensi negatif bahkan pada upaya rekonstruksi pasca-bencana. Di AS secara khusus, rekonstruksi kondisi pasca-bencana akibat badai Katrina di AS bersifat *top-down*. Pemerintah di sana lebih banyak menggelontorkan uang hingga ratusan miliar dollar kepada perusahaan besar yang bergerak di bidang perumahan, yang tidak membangun rumah bagi penduduk AS yang rentan, namun justru membangun ulang rumah mewah tetapi bukan untuk mereka.

Studi ini, dengan mengacu pada pandangan bahwa bencana bukan peristiwa alamiah sebaliknya bencana merupakan peristiwa non alamiah. Pandangan tersebut akan digunakan

untuk mendalami Program CSR Kampung Safety. Program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut merupakan praksis yang dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana di Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara, Indonesia dengan mitra utama PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta yang bergerak dalam upaya kesiapsiagaan bencana dan penyebarluasan pengetahuan mengenai mitigasi bencana berbasis masyarakat. Berbagai kegiatan dalam program yang dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana tersebut telah memiliki kecenderungan untuk menggunakan dan menyebarluaskan pandangan bahwa bencana di wilayah mereka merupakan peristiwa non-alami. Kenyataan tersebut selaras dengan sebagian studi terkini khususnya tentang bencana banjir di Jakarta yang terjadi sebagai serangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari campur tangan manusia dan karenanya bersifat non-alami (Smith, 2017).

B. METODE

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini bersifat kualitatif dengan model studi kasus (Gustafsson, 2017). Alasan penggunaan studi kasus dalam penelitian ini karena selain menyoroti praksis mitigasi bencana berbasis masyarakat, namun di sisi yang lain studi ini juga mencoba mengelaborasi praksis tersebut secara teoretis. Praksis mitigasi bencana berbasis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perdebatan bagaimana mula-mula bencana ditempatkan sebagai serangkaian peristiwa non-alamiah, baik penyebab maupun penanganannya. Bencana yang selama ini tampak alamiah seperti banjir, kekeringan, kebakaran, dan sebagainya kemunculan, dampak, dan penanganannya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan manusia. Dalam praktiknya, pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para informan yang terdiri dari anggota Kelompok Siaga Bencana, masyarakat Tugu Selatan yang tidak tergabung dalam kelompok namun aktif dalam program, dan juga pihak perusahaan. Selain itu, pengumpulan data dalam studi ini juga dilakukan melalui analisis berbagai literatur dan analisis dokumen Program Kampung Safety seperti dokumen pemetaan sosial, dokumen rencana kerja dan strategis, serta dokumen implementasi program.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bencana dan Masyarakat: Wacana tentang Bencana di Jakarta

Beberapa tahun terakhir studi terkait “bencana” khususnya di Jakarta, telah mengalami pergeseran. Beberapa studi tersebut telah mengacu pada pandangan mengenai bencana yang sebelumnya dianggap peristiwa alam, kemudian akhir-akhir ini bencana telah dipandang sebagai fenomena non-alamiah (Van Voorst, 2016b; Smith, 2017). Pergeseran studi tersebut menjadi angin segar bagi pengetahuan terkini tentang bencana, sebab hal tersebut dapat berpengaruh besar secara praksis dalam penanganan bencana yang tidak bersifat *top-down* namun *bottom-up*. Penanganan bencana yang lebih bersifat *bottom-up* juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat yang mana upaya masyarakat dalam penanganan bencana di bantaran sungai maupun kawasan pesisir akan lebih diakui. Artinya, bukan kebijakan dari pemerintah semata yang digunakan untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan bencana, namun juga mengakui upaya dan daya masyarakat untuk mengurai persoalan yang lebih dekat dengan mereka. Sehingga, penanganan bencana seperti banjir, rob, kebakaran, dan semacamnya juga akan lebih demokratis.

Hal tersebut selaras dengan studi dari Van Voorst (2016) yang berbicara tentang berbagai bentuk mitigasi bencana di pinggir sungai Jakarta oleh masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat Jakarta yang berada di pinggir sungai memiliki berbagai cara kreatif dan inovatif dalam menangani banjir rutin yang merangsek ke pemukiman mereka. Cara-cara tersebut menurut Voorst (2016) kadang kala memang dianggap tidak rasional serta tidak efektif baik oleh pengetahuan arus utama ataupun para ahli. Namun, terlepas dari anggapan tersebut,

pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang merasakan dan mengalami bencana. Cara-cara kreatif dan inovatif itulah yang sekalipun tidak dianggap rasional namun membuat masyarakat dapat beradaptasi di lingkungan yang dikepung bencana. Terlebih, bagi warga Jakarta persoalan banjir khususnya, adalah fenomena rutin yang harus mereka hadapi. Menunggu kebijakan dari berbagai pihak seperti pemerintah setempat untuk menangani banjir yang tiba-tiba datang kadang kala tidak sesuai dengan cara-cara mitigasi versi masyarakat yang jauh lebih cepat dan adaptif.

Refleksi atas kasus tersebut kian mengukuhkan pendapat beberapa studi akhir-akhir ini yang menyoroti kebijakan pemerintah yang justru mendorong tingkat keparahan bencana. Seperti studi Aiken (2004) terhadap bencana kebakaran yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, daripada menyalahkan kekeringan sebagai penyebab utama kebakaran, pada kenyataannya, kebijakan dan praktik penggunaan lahan yang tidak tepat yang justru membuat terjadinya kebakaran di dua pulau tersebut sangat parah. Kenyataan hampir mirip terjadi di Jakarta dengan bencana utama yang paling disorot yakni banjir. Pemerintah DKI memiliki program yang berkonsentrasi pada penanganan perubahan iklim dan tanggap bencana. Program tersebut memang telah melibatkan berbagai elemen seperti pengusaha, akademisi, bahkan juga diklaim melibatkan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, program tanggap iklim dan tanggap bencana tersebut menurut Puspita (2022) bahkan belum menunjukkan keberhasilannya secara signifikan. Sebab menurutnya, pemerintah DKI Jakarta masih begitu gagap dalam menangani persoalan banjir. Sebagai buktinya, banjir yang terjadi 2020 silam di Jakarta selain menelan 19 korban jiwa, namun juga menimbulkan kerugian material hingga triliun rupiah (Puspita, 2022).

Melakukan refleksi atas kegagalan penanganan bencana oleh pemerintah tersebut, cara-cara masyarakat Jakarta dalam memitigasi bencana secara mandiri, informal, dan lebih bersifat bottom-up Van Voorst (2016a) setidaknya dapat menjadi kabar baik untuk dijadikan acuan penanganan bencana. Meskipun cara-cara tersebut tidak bersifat struktural, namun kemungkinan untuk mempengaruhi kebijakan struktural sangat mungkin terjadi. Selain itu, pelajaran atas cara-cara masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana juga dapat menjadi kritik atas kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down* yang belum membuahkan hasil memuaskan dalam penanganan bencana. Selain itu, cara-cara masyarakat melakukan mitigasi bencana tersebut meski secara eksplisit tidak mengacu pada pandangan bahwa bencana adalah fenomena non-alamiah, namun praksis dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Jakarta cenderung mengarah pada pandangan tersebut. Seperti yang mengemuka pada studi Surtiari et al., (2017) pada kelompok masyarakat Muara Baru, Jakarta Utara yang memiliki berbagai elemen khas bersifat budaya yang berhubungan langsung dengan ketahanan masyarakat di sana dalam melakukan mitigasi bencana. Elemen-elemen budaya yang khas tersebut yang kemudian dapat menandai sejauh mana masyarakat memahami bencana dan bagaimana mereka dapat mengatasinya.

Dalam studi ini, yang secara khusus menyoroti praksis masyarakat Tugu Selatan, Jakarta Utara, dalam mengenali masalah terkait kebencanaan dan cara penanganannya, masyarakat tersebut memiliki semangat hampir serupa dengan studi Surtiari et al., (2017) pada masyarakat Muara Baru. Masyarakat Tugu Selatan memiliki cara tersendiri dalam mengenali bencana dan cara menanganinya. Dalam Dokumen Pemetaan Sosial yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta tahun 2023, misalnya, dengan detail telah disebutkan bagaimana masyarakat Tugu Selatan mengenali persoalan bencana di lingkungan mereka. *Pertama* cara warga Tugu Selatan mengenali persoalan banjir rutin yang melanda kelurahan mereka yang terjadi “setiap bulan Desember-Februari dan menyebabkan luapan air hingga satu meter” (Wijaya and Husin, 2022, p. 1639). Warga Tugu Selatan tidak mengenali penyebab bencana banjir tersebut hanya karena rendahnya wilayah mereka dan telah berada di bawah permukaan laut. Namun, masyarakat Tugu Selatan khususnya warga RW. 03

bahkan menyadari keberadaan villa yang berada dekat dengan pemukiman mereka berkontribusi pada keparahan banjir yang melanda kelurahan mereka (Dokumen Pemetaan Sosial, 2023).

Pasca pembangunan villa, warga mengaku aliran air hujan yang seharusnya mengalir ke jalan air menjadi tersumbat oleh bangunan villa. Pihak pengembang villa yang selayaknya membangun kembali saluran air tidak melakukan upaya tersebut dengan benar karena saluran air justru difungsikan sebagai got. Belajar dari kasus tersebut, mengamati pemahaman masyarakat semacam ini mungkin akan menimbulkan ketegangan sosial yang besar di antara berbagai pihak seperti masyarakat dengan pengembang villa. Namun, dengan tidak berfokus pada “ketegangan sosial” dan lebih menyorot pandangan warga Tugu Selatan, dapat dikatakan bahwa mereka secara implisit telah mengenali bencana sebagai serangkaian fenomena non-alamiah (Madjid *et al.*, 2024). Kenyataan semacam ini merupakan kabar baik yang dapat mengantarkan masyarakat untuk berperan dalam menangani masalah kebencanaan dalam lingkungannya sendiri.

Argumen tersebut lebih kuat lagi mengacu pada kenyataan *kedua*, bahwa masyarakat Tugu Selatan juga telah memiliki cara mengenali persoalan bencana lain seperti kebakaran yang terjadi bukan karena kesengajaan semata. Namun, selaras dengan studi Putri, Lestari and Wardhany (2021), misalnya, salah satu faktor utama penyebab kebakaran di Jakarta Utara adalah karena padatnya pemukiman di wilayah tersebut. Kepadatan pemukiman dan penduduk tersebut, menurut warga Tugu Selatan, dibarengi dengan kebiasaan beberapa warga itu sendiri yang belum banyak melakukan pengolahan sampah dan sering melakukan pembakaran sampah yang potensial memicu kebakaran di tengah pemukiman yang padat (Dokumen Pemetaan Sosial, 2023). Pada titik inilah, dokumen pemetaan sosial perusahaan tidak hanya mendokumentasikan bagaimana perilaku masyarakat dapat memicu bencana, akan tetapi sekaligus memperhatikan bahwa sebagian warga Tugu Selatan telah mengenali kebakaran sebagai fenomena non-alami.

Selain itu, *ketiga*, bencana yang kurang disorot namun disadari dan dirasakan langsung oleh warga Tugu Selatan adalah kekurangan pangan. Saat ini bencana kekurangan pangan mungkin tak terlalu tampak dan hanya sedikit menjadi perhatian, namun studi Fiisabiilillah and Maulana (2016) mengungkap hal sebaliknya. Selain krisis pangan dapat terjadi di Jakarta yang salah satunya disebabkan oleh terjangan banjir rutin yang melanda. Namun juga menurut keduanya, bahkan diperlukan solusi distribusi pangan langsung dari kota-kota lain seperti Jawa Barat untuk menyuplai kebutuhan pangan seperti beras ke Jakarta. Potensi krisis pangan ini sebenarnya juga dipahami oleh Warga Tugu Selatan meskipun tidak mereka ungkapkan secara eksplisit. Mereka mengenali, misalnya, pemukiman mereka yang padat telah dihuni oleh banyak orang. Alhasil, tidak ada lahan bagi mereka untuk dapat menanam tanaman pangan. Selain itu, air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan dasar juga kian sulit mereka peroleh selain karena masifnya intrusi air tanah yang membuat kualitas air semakin buruk.

Sumur-sumur yang mereka bangun tidak dapat menjadi sumber air bersih karena berbau tidak sedap dan memicu gatal pada kulit. Sehingga, warga Tugu Selatan mengandalkan air bersih dari membeli air dengan jerigen. Realitas krisis air bersih ini disebabkan oleh banyak faktor seperti: intrusi air tanah berlebihan oleh penduduk dan industri, banyaknya bangunan besar dan tinggi yang kemudian memicu penurunan muka tanah (Dokumen Pemetaan Sosial, 2023). Dampaknya, ketika daerah tersebut dekat dengan laut seperti di Jakarta Utara, maka air laut potensial merembes dan mengisi celah kekosongan akibat intrusi air tanah berlebihan tersebut. Permukaan tanah menjadi turun dan potensi banjir maupun rob menjadi tak terhindarkan. Poin penjelasan inilah yang mengukuhkan bahwa persoalan ketahanan pangan, persis seperti kasus di Ghana (Atanga and Tankpa, 2021), berhubungan langsung dengan persoalan bencana lain seperti banjir dan rob.

Dalam konteks Kelurahan Tugu Selatan ini, kebutuhan air bersih yang kian menipis disebabkan oleh serangkaian bencana seperti banjir, rob, penurunan muka tanah, intrusi air tanah berlebih, dan semacamnya. Kebutuhan air bersih kemudian harus diatasi dengan membeli kepada penyedia air bersih dan berpengaruh pada nominal besar yang harus dikeluarkan oleh warga. Sedangkan sebagian besar penduduk Tugu Selatan memiliki pendapatan di bawah UMR (Dokumen Pemetaan Sosial, 2023). Sehingga, pada titik inilah dapat dicermati lebih mendalam bahwa mitigasi bencana yang biasanya hanya dilakukan saat bencana melanda kurang mampu untuk mengatasi berbagai persoalan kerentanan masyarakat akibat bencana setelahnya yang ternyata berlangsung lebih lama dan panjang. Itu mengapa, kadang kala, titik kecenderungan kegagalan pemerintah dalam penanganan bencana adalah pada pemulihan pasca-bencana di mana konsistensi keterlibatan pemerintah lebih sering absen.

Hal tersebut sangat terang dijelaskan dalam studi Octavianti and Charles (2019) yang menyoroti evolusi kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menangani banjir selama 400 tahun terakhir. Menurut keduanya, umur rezim pemerintahan provinsi (Pemprov) yang pendek membuat Pemprov cenderung memilih kebijakan infrastruktur penanganan banjir karena dapat dijalankan dalam rezim politik yang relatif pendek tersebut. Solusi infrastruktur juga dipilih karena merupakan solusi yang dianggap cepat, namun tidak berarti efektif dan berbiaya sangat mahal. Dari situlah dapat dilihat lebih jelas bahwa penanganan bencana yang berjangka waktu lama, panjang, dan konsisten bukan menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dari rezim ke rezim. Sehingga tak pelak studi Van Voorst (2016a, 2016b) dan Surtiari *et al.* (2017) kemudian muncul dan lebih mengemukakan bagaimana upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta yang lebih bersifat budaya, adaptif, dan informal. Jenis upaya yang bersifat alternatif tersebut muncul karena kebijakan penanganan bencana yang biasanya bersifat *top-down* dari Pemprov DKI telah gagal menjadi solusi. Dalam studi ini, alternatif upaya yang muncul dari masyarakat akibat gagalnya usaha penanganan bencana yang bersifat *top-down* tersebut juga mengemuka pada masyarakat Tugu Selatan dan akan dijelaskan pada sub-bagian selanjutnya.

2. Dari Alamiah ke Non-Alamiah: Belajar dari Peran Kelompok Siaga Bencana

Telah disebutkan pada sub-bagian sebelumnya bahwa masyarakat Tugu Selatan telah memiliki kecenderungan mengenali bencana seperti banjir, kebakaran, dan krisis pangan sebagai sesuatu yang mereka rasakan dan kemunculannya tidak alamiah. Selain ketiga bencana tersebut, potensi bencana yang sangat mungkin mereka alami adalah gempa, likuifaksi, dan tsunami yang mengancam kawasan pesisir utara Jakarta dan telah diprediksi para ahli serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (Artia, Sunoko and Wibowo, 2021; Linverando, Sentosa and Iskandar, 2022; Supendi *et al.*, 2023). Bencana tersebut secara permukaan sering dipahami sebagai bencana alam atau bersifat alamiah. Namun, ketika merujuk pada pandangan Smith (2006) tidak ada yang disebut bencana alamiah sepanjang dalam suatu geografi terdapat sejarah orang yang bermukim di atasnya. Terlebih di Kelurahan Tugu Selatan memiliki kepadatan penduduk tinggi (BNPB, 2016).

Berangkat dari berbagai potensi kerentanan bencana yang dialami oleh warga Tugu Selatan inilah, tak pelak ketika PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta kemudian hadir mengajak warga Tugu Selatan menggalakkan kesiapsiagaan bencana, maka gaung bersambut diperoleh oleh perusahaan. Program kesiapsiagaan bencana yang dimaksud adalah Program Kampung Safety yang telah bergulir sejak tahun 2021. Latar belakang adanya program tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari berbagai kerentanan dan potensi bencana yang dialami oleh warga Tugu Selatan. Berbagai kerentanan itu pula lah yang mendorong warga untuk menguatkan solidaritas dalam kesiapsiagaan bencana yang kemudian melahirkan Kelompok Siaga Bencana. Kelompok Siaga Bencana berperan aktif dalam

penyebarluasan pengetahuan dan praksis dalam menghadapi serangkaian bencana yang mengancam kehidupan warga Tugu Selatan.

Kelompok Siaga Bencana ini juga dipelopori oleh satu *local hero* yang sangat aktif dalam menggerakkan warga lain dalam menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana, yakni Sri Rachmawati. Sejauh ini, Sri Rachmawati telah memiliki peran sentral dalam menguatkan solidaritas warga dalam praksis kesiapsiagaan bencana. Namun, di samping peran Sri Rachmawati yang sentral baik dalam berbagai pemecahan persoalan kelompok, resolusi konflik, serta secara aktif terus melakukan komunikasi dengan kelompok, akan tetapi anggota kelompok lain tidak direduksi perannya. Justru dengan adanya *local hero*, semangat dan keaktifan kelompok lebih terjaga. Di samping itu, para anggota kelompok pada dasarnya juga telah memiliki pandangan bahwa sebenarnya serangkaian bencana dan potensi bencana seperti: banjir, kebakaran, krisis pangan, gempa, dan tsunami yang mengancam kehidupan mereka tidak dipandang sebagai fenomena alami. Sebaliknya, cara-cara bagaimana mereka mengenali bencana yang telah dijelaskan sebelumnya, telah dapat memberikan pengertian bahwa berbagai potensi bencana tersebut tidak alamiah. Oleh karenanya, hal tersebut sebisa mungkin mereka atasi.



Gambar 1. Potret Kelompok Siaga Bencana

Sumber: Dokumentasi CSR Perusahaan (2024)

Sejak tahun 2021, saat Program Kampung Safety mulai digalakkan, praksis kesiapsiagaan bencana yang telah diterapkan oleh Kelompok Siaga Bencana bersama dengan CSR PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta adalah *pertama* berbagai pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana. Berbagai pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tersebut sangat beragam dan difasilitasi oleh CSR Perusahaan. Selain itu, tujuan dari simulasi dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan adaptasi dan responsivitas masyarakat Tugu Selatan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam mereka. Berbagai pelatihan dan simulasi bencana yang telah dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pelatihan dan Simulasi Siap Siaga Bencana Program Kampung Safety

Jenis Pelatihan dan Simulasi	Capaian
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok memahami skenario penerapan K3 dan penyelamatan korban saat bencana maupun situasi darurat terjadi ● Kelompok memahami penggunaan alat pelindung diri (APD) secara mandiri dan diterapkan di setiap RW di Tugu Selatan ● Kelompok memahami proses evakuasi sesuai standar K3 saat bencana seperti: gempa, banjir, dan kebakaran terjadi

ARTIKEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelatihan dan simulasi lebih lanjut, kelompok diupayakan untuk mendapatkan sertifikasi K3 dari Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP)
Simulasi Evakuasi Gempa	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok memahami proses evakuasi gempa seperti penyelamatan korban, penyelamatan barang berharga, hingga penanganan gempa di dalam maupun luar ruangan seperti penentuan titik kumpul
Simulasi Pemadaman Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok memahami proses pemadaman kebakaran yang aman dan efektif, serta memahami pula bagaimana menghindari asap akibat kebakaran dan memahami cara membuat jalur evakuasi saat kebakaran terjadi.
Simulasi Penanganan Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok memahami teknik pertolongan pertama, termasuk perawatan luka dan cedera akibat kebakaran, gempa, dan bencana lainnya.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berbagai pelatihan dan simulasi bencana di atas sebenarnya hanya sebagian dari beragam pelatihan siap siaga bencana yang kemudian terus dilakukan oleh Kelompok Siap Siaga Bencana bersama warga Tugu Selatan lebih luas, serta difasilitasi oleh CSR Perusahaan. Selain itu, berbagai pelatihan tersebut juga merupakan bekal bagi kelompok dan masyarakat Tugu Selatan untuk diterapkan dalam berbagai kegiatan di luar simulasi. Serta, diterapkan pula saat bencana seperti banjir rutin, misalnya, yang menggenangi pemukiman Tugu Selatan kembali terjadi. Kemudian, berbagai kegiatan di luar simulasi dan pelatihan siap siaga bencana juga diselenggarakan oleh kelompok bersama dengan masyarakat Tugu Selatan lebih luas. Kegiatan-kegiatan tersebut muncul pasca berbagai pelatihan dan simulasi siap siaga bencana dilakukan. Kegiatan yang dimaksud adalah aktivasi Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat.



Gambar 2. Potret Pelatihan, Simulasi Siap Siaga Bencana, dan Sertifikasi K3 BNSP

Sumber: Dokumentasi CSR Perusahaan (2024)

Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat merupakan dua aktivitas yang dijalankan oleh Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas, yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan sandang dan pangan untuk korban saat berbagai bencana terjadi. Keberadaan Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat tersebut bersifat komplementer atau saling melengkapi. Warung Siap Siaga, misalnya, lebih ditujukan untuk menyediakan kebutuhan sandang dan pangan mentah bahkan saat bencana tidak terjadi. Sehingga kelompok yang secara rutin menjaga warung tersebut juga diuntungkan karena dapat menjadi wahana bagi anggota kelompok mendapatkan penghasilan tambahan. Lalu, saat bencana, misalnya, banjir atau kebakaran terjadi, aktivasi Dapur Darurat yang merupakan bagian dari Warung Siap Siaga kemudian dioperasikan. Dapur Darurat kemudian dengan segera dioperasikan sebagai dapur umum untuk menyediakan berbagai olahan makanan yang kemudian dibagikan kepada para korban bencana.

Sejauh ini keberadaan Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat dapat dikatakan telah terorganisir dengan baik. Kedua kegiatan tersebut telah banyak membantu warga Tugu Selatan

itu sendiri ketika menghadapi bermacam bencana khususnya banjir dan kebakaran yang kerap terjadi. Sehingga, Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat ini dalam perkembangannya tidak hanya telah membantu warga Tugu Selatan saja, namun juga secara fleksibel telah membantu penanganan korban bencana di Jabodetabek, Kota Demak, serta Kota Cirebon (Dokumen Implementasi Program, 2023). Dengan berbagai pengalaman itulah, selain Kelompok Siap Siaga Bencana dari Tugu Selatan membantu penanganan bencana ke berbagai daerah, namun juga dalam waktu bersamaan ilmu mengenai mitigasi bencana semakin banyak mereka dapatkan. Pengalaman itu pula lah yang kian mengukuhkan rasa kepemilikan kelompok terhadap Program Kampung Safety yang mula-mula diawali dengan berbagai pelatihan, dan kini telah melahirkan praksis siap siaga bencana yang telah membuat kelompok perlahan mahir dalam mitigasi bencana.

Dalam perkembangannya, Kelompok Siaga Bencana juga tidak hanya berkontribusi pada penanganan korban bencana di Tugu Selatan maupun berbagai daerah lain. Namun kini, kelompok tersebut juga telah mengembangkan kegiatan yang dapat mengatasi persoalan kerentanan pasca-bencana yakni krisis pangan melalui pengelolaan limbah yang baik, penghijauan, dan praktik *vertical urban farming*. Sejauh ini, kelompok telah berhasil mengumpulkan setidaknya 2 ton hasil *vertical urban farming* yang mana praktik tersebut sekaligus mengurangi emisi karbon di Tugu Selatan yang padat penduduk (Dokumen Implementasi Program, 2023). Solusi atas persoalan krisis pangan yang dihadapi oleh warga Tugu Selatan ini dapat mencerminkan praktik penanganan bencana berkelanjutan yang selama ini kurang bisa dipayungi oleh kebijakan rezim pemerintahan dalam penanganan bencana yang tergesa-gesa, instan, dan mengedepankan kecepatan (Octavianti and Charles, 2019).

Pada akhirnya, persepsi berbeda antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanganan bencana dan penanganan kerentanan pasca-bencana seperti ini kadang kala berakibat buruk pada pengurangan risiko bencana itu sendiri (Sunarharum, Sloan and Susilawati, 2021). Sehingga, di tengah kebuntuan semacam ini, mengakui serta mendokumentasikan alternatif yang khas dari masyarakat Jakarta dalam beradaptasi dan menangani bencana barangkali merupakan salah satu solusi penanganan bencana yang dapat dilakukan. Di samping serangkaian potensi berbagai bencana yang mengancam DKI Jakarta. Sehingga, persis seperti pernyataan Dwirahmadi *et al.*, (2019) bahwa pada dasarnya perlu upaya untuk menggeser paradigma pembangunan atau infrastruktur yang melekat pada kebijakan penanganan bencana di Jakarta menuju paradigma ketahanan dari rakyat yang potensial membuka kemitraan penanganan bencana dengan berbagai pihak termasuk dengan swasta dan organisasi masyarakat sipil. Mengapa penting untuk melakukan pergeseran paradigma tersebut akan dijelaskan pada sub-bagian selanjutnya.

3. Refleksi tentang Penanganan Bencana yang Lebih Demokratis dan *Bottom-Up*

Dengan keterbatasan studi ini, belum banyak pelajaran yang dapat diambil untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta khususnya, dalam menangani pelbagai jenis bencana yang mengancam Jakarta. Namun, terdapat satu pelajaran penting yang disorot dalam studi ini mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta selama ini dalam penanganan bencana banjir yang tampaknya belum memuaskan. Studi Octavianti dan Charles (2019), misalnya, keduanya telah menjelaskan bahwa dalam kurun 400 tahun terakhir kebijakan penanganan bencana banjir yang dianut oleh Pemprov DKI Jakarta lebih mengacu pada penanganan cepat dan didominasi oleh proyek infrastruktur. Menurut keduanya, solusi semacam itu seringkali dipilih karena dirasa cepat dan sesuai dengan umur rezim pemerintahan yang bersifat kilat. Sehingga, alih-alih secara serius benar-benar ingin menangani bencana banjir yang rutin melanda Jakarta, kebijakan infrastruktur yang bersifat *top-down* tersebut justru berujung sebagai “teknikalisasi permasalahan” untuk mencapai target politik tertentu (Dean, 2009; Bukhori, 2018).

Artinya, persoalan banjir, misalnya, dikonstruksi oleh kebijakan tersebut sebagai persoalan yang dapat diatasi melalui cara-cara yang lebih mudah dipahami seperti solusi infrastruktur. Padahal, berkaca pada peran Kelompok Siaga Bencana yang telah mempelajari kesiapsiagaan bencana, mereka tidak hanya mengatasi bencana dengan satu resep teknis yang sama sekali tidak mengatasi serangkaian potensi dan kerentanan bencana seperti banjir, kebakaran, krisis pangan, gempa bumi, dan sebagainya. Namun, Kelompok Siaga Bencana di Kelurahan Tugu Selatan memulainya dengan *pertama* melakukan penguatan solidaritas antar warga untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya mitigasi bencana dan secara bersama-sama bergerak untuk belajar cara menangani bencana yang tepat. *Kedua* Kelompok Siaga Bencana juga secara konsisten menguatkan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana melalui berbagai pelatihan dan simulasi penanganan bencana.

Berkat berbagai pelatihan tersebut, *ketiga*, kemudian muncul Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat untuk penanganan berbagai bencana tidak hanya di wilayah Tugu Selatan itu sendiri namun juga diterapkan ke berbagai daerah yang sedang mengalami bencana. Selain itu, Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas yang telah banyak belajar mengidentifikasi dan mengenali persoalan bencana di lingkungannya, tidak hanya menangani persoalan bencana saat bencana tersebut datang. Akan tetapi, persoalan pasca-bencana dan berbagai kerentanan pangan, misalnya, yang disebabkan oleh banjir, kebakaran, dan sebagainya, pada akhirnya juga kelompok atasi melalui upaya *keempat* yakni *vertical urban farming*. Di tengah pemukiman padat penduduk dan lahan tanam yang terbatas, upaya *vertical urban farming* merupakan usaha yang paling mungkin mereka lakukan. Dengan ketelitian dan konsistensi dalam praksis *urban farming* tersebut, kelompok dapat mendulang hasil fantastis hingga 2 ton hasil pangan dari bertani vertikal tersebut. Hasil tersebut akhirnya pula dapat sedikit mengatasi persoalan kerentanan pangan yang selama ini dihadapi oleh warga Tugu Selatan. Kerentanan yang terjadi semakin parah saat bencana seperti banjir datang.

Cara-cara penanganan bencana oleh Kelompok Siaga Bencana yang bergulir dari 2021 hingga saat ini tersebut bukan merupakan cara instan dan cepat yang lahir dari kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down*. Akan tetapi, cara-cara penanganan bencana yang berkelanjutan, bersifat preventif, edukatif, serta kolaboratif tersebut dibangun melalui proses yang panjang dan lama. Selain itu, penanganan bencana semacam itu meskipun kadang kala oleh para ahli barat khususnya, disebut kurang efektif dan tidak efisien (Van Voorst, 2016a). Namun, penanganan bencana yang lahir dari daya upaya masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk CSR perusahaan tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengatasi persoalan bencana yang benar-benar mereka rasakan. Cara-cara semacam itu juga merupakan cara yang lebih demokratis di mana pengelola lingkungan dan berbagai persoalan yang meliputinya, bukan ditentukan oleh kebijakan yang dominan dari atas seperti Pemprov DKI semata. Akan tetapi, masyarakat yang hidup di lingkungan Tugu Selatan dan mengenal lingkungan mereka dengan baik yang juga berhak menentukan bagaimana lingkungan tersebut dikelola (Gould, Garcia and Remes, 2016).

Biasanya pandangan yang mendasari kebijakan yang lebih bersifat *top-down* daripada *bottom-up* tersebut adalah anggapan lama, yakni bencana adalah serangkaian peristiwa alamiah sehingga kecenderungan praksis untuk menangani hal tersebut adalah penaklukan alam (Gibb, 2018). Padahal alam tak selayaknya ditaklukan oleh dominasi manusia yang tercermin pada kebijakan yang bersifat *top-down*, namun alam bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia ketika dikelola secara seimbang dan tidak dominatif (Kronfeldner, 2018). Seperti upaya penanganan kerentanan pangan yang dialami oleh masyarakat Tugu Selatan dan semakin parah terjadi ketika bencana datang. Kelompok Siaga Bencana kemudian berinisiatif untuk melakukan berbagai upaya mengatasi kerentanan tersebut melalui *vertical urban farming*. Secara permukaan, upaya tersebut barangkali tidak mendulang hasil cepat dan fantastis, namun upaya tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah penghasilan sampingan

mereka dalam waktu yang lama. Terlebih, serangkaian potensi bencana yang bisa datang kapan saja juga terus menjadi ancaman kehidupan mereka sehari-hari dan mengancam kondisi ketahanan pangan mereka.

Selain itu, satu refleksi lain yang dapat diperoleh dari proses panjang Kelompok Siaga Bencana dalam implementasi Program Kampung Safety adalah tentang bagaimana upaya dari kelompok dapat mempengaruhi kebijakan penanganan bencana di Kelurahan Tugu Selatan. Program Kampung Safety berhasil memicu munculnya peraturan baru di Kelurahan Tugu Selatan berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewaspadaan bencana seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Lalu, hal paling penting yang perlu disorot dari kabar baik mengenai bagaimana kelompok dalam mempengaruhi kebijakan tersebut ialah bahwa kebijakan yang muncul bersandar pada histori yang jelas. Artinya, regulasi tersebut tidak ditetapkan secara *top-down* oleh satu *stakeholder* kemudian diterapkan di berbagai tempat dengan satu solusi yang sama. Namun, kebijakan penanganan bencana di Tugu Selatan tersebut muncul dan hadir dari bawah, yakni dari pengaruh Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas yang merasakan dan mengenali sendiri persoalan bencana di lingkungan mereka.

Hal tersebut berbeda dengan bagaimana kebijakan penanganan bencana level provinsi ditetapkan. Seperti saat penetapan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk menangani banjir dan rob di Teluk Jakarta yakni melalui dibangunnya *Giant Sea Wall*, misalnya. Proyek infrastruktur tanggul laut raksasa tersebut telah menuai kritik dari berbagai pihak karena salah satunya bukan mengatasi banjir, rob, dan penurunan tanah, namun justru akan memperparahnya (Octavianti and Charles, 2018). Akan tetapi, meskipun berbagai kritik dilayangkan kepada Pemprov DKI Jakarta, namun proyek yang belum tentu dapat mengatasi penurunan muka tanah yang parah, banjir, dan rob tersebut tetap dijalankan karena merupakan ketetapan dari para tekno-politik dan merupakan proyek infrastruktur besar yang cenderung lebih disukai (Colven, 2017). Terlebih proyek besar tersebut merupakan proyek kerjasama antara Belanda dan juga Indonesia.

Akan tetapi, meskipun proyek tersebut besar, namun belum tentu sesuai dengan penanganan bencana yang ada di akar rumput. Sebab, proyek tersebut berkonsentrasi pada pembenahan infrastruktur skala besar, namun di sisi lain kemungkinan besar dapat meminggirkan kaum marjinal perkotaan (Wiryomartono and Wiryomartono, 2020). Bagaimana peminggiran tersebut dapat terjadi dapat dibayangkan dari pembelajaran berharga atas kasus pemulihan pasca-bencana badai Katrina di Amerika Serikat (AS) tahun 2005 silam. Nominal uang berjumlah besar digelontorkan pemerintah AS kepada para pengembang perumahan di sana dalam rangka pemulihan bencana. Akan tetapi, pada kenyataannya solusi tersebut justru semakin membuat warga AS yang hidup di bawah kemiskinan justru semakin rentan dan terpinggirkan. Pasalnya, pembangunan perumahan tersebut hanya bisa dinikmati oleh para elit kaya, bukan para korban badai Katrina yang berada pada posisi kerentanan secara ekonomi (Smith, 2006).

Pada titik itulah kadang kala, proyek penanganan bencana yang hanya mengacu pada penyederhanaan solusi yakni melalui proyek infrastruktur memang menawarkan hasil kilat. Akan tetapi, belum tentu hasil tersebut merupakan solusi sebenarnya untuk menangani bencana dan rekonstruksi pasca-bencana. Belum tentu pula solusi tersebut ditujukan bagi warga biasa yang sebelum bencana terjadi telah rentan secara ekonomi dan kian terjerumus pada posisi kerentanan pasca dihantam bencana. Oleh karena itu, kembali melakukan refleksi pada cara-cara Kelompok Siaga Bencana di Kelurahan Tugu Selatan dalam menangani bencana dan menyentuh kondisi kerentanan, sekalipun hal tersebut dilakukan dengan tidak berbiaya besar dan tidak mendulang hasil instan. Namun, cara-cara tersebut lebih baik daripada solusi infrastruktur semata. Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas telah

menyadari bahwa menangani bencana bukan hanya saat bencana sedang terjadi. Akan tetapi, sebelum dan setelah bencana terjadi penanganan bencana tetap harus dilakukan.

Warga Tugu Selatan dikepung oleh serangkaian potensi bencana yang mengancam seperti: banjir, rob, gempa bumi, kebakaran, dan krisis pangan. Di samping serangkaian potensi bencana tersebut notabene warga Tugu Selatan tidak berada pada kondisi finansial yang mapan namun rentan miskin. Ketika bencana tiba-tiba datang dalam kehidupan mereka, maka risiko mereka untuk terjerumus dalam kemiskinan dapat semakin mendalam. Oleh karena itu, cara-cara Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas untuk melakukan *vertical urban farming* sebenarnya merupakan alternatif solusi penanganan bencana yang lebih bersifat keberlanjutan daripada sekadar proyek infrastruktur. Cara semacam itu tidak menciptakan hasil yang dapat dilihat secara langsung, namun bisa dirasakan dan diterapkan secara berkelanjutan. Melalui *urban farming*, misalnya, warga Tugu Selatan dapat memperoleh penghasilan di luar pekerjaan utama mereka. Proses semacam ini dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerentanan ekonomi mereka bahkan saat bencana tidak datang.

Apabila sewaktu-waktu tidak beruntungnya lingkungan warga Tugu Selatan dihantam bencana, pembelajaran dari proses *urban farming* tersebut dapat mereka pergunakan kembali sebagai solusi pemulihan bencana. Sebab, pasca-bencana biasanya bukan hanya infrastruktur seperti rumah, kendaraan, dan barang-barang saja yang rusak, namun kondisi ekonomi sangat mungkin macet. Selain itu, bencana juga dapat berdampak pada bencana lain seperti krisis pangan. Sehingga, kegiatan untuk memperoleh hasil pangan sangat diperlukan dalam proses rekonstruksi pasca-bencana. Proses semacam inilah yang absen dan tidak terlalu dipikirkan oleh solusi infrastruktur dalam penanganan bencana khususnya bencana banjir di Jakarta. Solusi penanganan bencana dan pasca-bencana yang dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana dapat dikatakan relatif lama dan panjang, serta tidak mendulang hasil memukau yang secepat kilat dapat dilihat. Namun, solusi dari Kelompok Siaga Bencana dalam Program Kampung Safety dengan mitra utama CSR PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta benar-benar solusi yang muncul dari identifikasi masalah bencana yang mereka hadapi dan rasakan.

D. KESIMPULAN

Memandang bencana sebagai fenomena alami bukan non-alami menuai perdebatan panjang sejak abad 17 hingga saat ini. Pandangan tersebut tidak hanya memiliki dampak secara literal namun juga memiliki konsekuensi praksis. Dengan studi ini yang berfokus pada menyoroti praksis mitigasi bencana oleh Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas, kemudian dapat disimpulkan dan dapat diperoleh banyak pelajaran berharga bahwa *pertama* warga Tugu Selatan notabene telah mampu mengidentifikasi persoalan mengenai bencana dan berbagai kerentanan yang ditimbulkan bencana maupun tidak. *Kedua*, cara bagaimana warga Tugu Selatan mengenal serangkaian potensi bencana yang mengancam kehidupan mereka menandakan bahwa mereka memiliki pandangan mengenai bencana bukan sebagai peristiwa alami namun non-alami. Bagi warga Tugu Selatan serangkaian potensi bencana yang mengepung lingkungan mereka seperti: banjir, kebakaran, krisis pangan, bahkan gempa bumi dan tsunami tidak sepenuhnya berlangsung alamiah. Selain bencana tersebut hadir karena diperparah oleh campur tangan manusia, misalnya, banjir yang diperparah oleh pembangunan villa di sekitar Tugu Selatan. Namun juga, kawasan Tugu Selatan merupakan daerah padat penduduk. Sepanjang daerah yang dihantam bencana terdapat manusia di atasnya dapat dikatakan peristiwa bencana tersebut tidak alamiah (Smith, 2006).

Oleh karena itu, *ketiga*, saat CSR PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta mengajak warga Tugu Selatan untuk bergerak melaksanakan program kesiapsiagaan bencana bertajuk Kampung Safety, warga menyambut dengan baik karena program tersebut sesuai dengan kebutuhan warga Tugu Selatan. Program yang bergulir sejak tahun 2021 tersebut dipelopori oleh Kelompok Siaga Bencana yang aktif menggalakkan berbagai kegiatan siap

siaga bencana dan aktif untuk menguatkan solidaritas dengan warga Tugu Selatan, khususnya untuk penanganan bencana. Adapun beberapa kegiatan dalam program adalah pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana, aktivasi Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat, serta kegiatan *vertical urban farming*. Tiga kegiatan yang berada dalam satu payung Program Kampung Safety tersebut berkaitan satu sama lain dan merupakan serangkaian upaya mitigasi bencana yang bersifat preventif, edukatif, sekaligus kolaboratif.

Keempat, kegiatan mitigasi bencana tersebut dapat dikatakan merupakan alternatif penanganan bencana di pinggir Kota Jakarta oleh warga Tugu Selatan yang tidak bersifat *top down* melainkan *bottom up*. Serta alternatif penanganan bencana tersebut juga lebih bersifat demokratis karena masyarakat Tugu Selatan turut serta mengidentifikasi masalah dan mengelola lingkungannya. Selain itu, kegiatan dalam Program Kampung Safety juga telah sesuai dengan identifikasi persoalan kebencanaan dan kerentanan yang selama ini dialami dan dirasakan oleh Warga Tugu Selatan. Kegiatan siap siaga bencana tersebut tidak bersifat instan dan cepat seperti halnya proyek infrastruktur skala besar *Giant Sea Wall* milik Pemprov DKI yang sering menjadi solusi bencana namun belum terbukti dapat mengatasi persoalan seperti bencana banjir. Kegiatan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat kadang kala hasilnya tidak seterang proyek infrastruktur yang mana hasilnya dapat dilihat secara langsung. Akan tetapi seringnya, berbagai kegiatan tersebut justru bersifat berkelanjutan dan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan bencana dan rekonstruksi pasca-bencana.

Dalam kegiatan *vertical urban farming*, misalnya, Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas tidak hanya melakukan kesiapsiagaan bencana saat bencana sewaktu-waktu datang. Namun, kegiatan yang menghasilkan pangan dan pendapatan di luar pekerjaan utama warga tersebut dapat digunakan untuk menambal kebutuhan sehari-hari warga yang berada dalam kerentanan ekonomi. Selain itu, hasil dari kegiatan *urban farming* tersebut juga dapat digunakan sebagai alternatif pemulihan pasca-bencana yang mana kadang kala bencana tidak hanya merusak barang, kendaraan, dan pemukiman, namun juga menciptakan kemacetan ekonomi. Sehingga, pembelajaran dari proses *urban farming* ini dapat digunakan untuk pemulihan jangka panjang setelah bencana seperti banjir, misalnya, melanda. Pembelajaran *urban farming* itu pula lah yang merupakan bekal pengetahuan bagi warga untuk memulihkan kondisi sebelum dan pasca-bencana terjadi.

Itu mengapa, *keenam*, meskipun kadang kala cara-cara masyarakat dalam mitigasi bencana tidak langsung dapat dilihat dan dihitung, namun hal tersebut nyata hadir menjadi solusi penanganan bencana yang justru sesuai dengan kebutuhan mereka. Aktivasi Warung Siap Siaga dan Dapur Darurat, misalnya, kegiatan dalam ruang tersebut membuat warga Tugu Selatan tidak hanya dapat menangani bencana yang tiba-tiba bisa datang menghantam pemukiman mereka. Namun, kegiatan dalam ruang tersebut menambah pengetahuan dan praksis penanganan bencana yang dapat diterapkan untuk membantu penanganan bencana di daerah lain yang dihantam bencana. Warga Tugu Selatan yang sebelumnya dengan daya mereka dapat perlahan menolong diri mereka sendiri, melalui program Kampung Safety, mereka dapat menolong lebih banyak orang di daerah lain yang dihantam bencana.

Ketujuh, akhirnya, pelbagai kegiatan dan pembelajaran yang diperoleh oleh Kelompok Siaga Bencana dan warga Tugu Selatan lebih luas dalam kesiapsiagaan bencana tersebut juga membuahkan regulasi tingkat kelurahan mengenai kesiapsiagaan bencana. Kenyataan tersebut kian mengukuhkan bahwa penanganan bencana berbasis masyarakat lebih bersifat demokratis dan memberikan kesempatan bagi masyarakat mengelola lingkungannya. Serta, memberi kesempatan pula pada masyarakat untuk bermitra dengan berbagai pihak termasuk CSR perusahaan. Penanganan bencana yang lebih demokratis tersebut juga tercermin pada proses bagaimana kebijakan penanganan level kebijakan ditetapkan yakni kebijakan tersebut mempertimbangkan suara rakyat dari bawah. Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan suara

orang-orang yang sebelumnya mungkin kurang didengar dan kurang dipertimbangkan oleh kebijakan yang alur penetapannya bersifat *top-down*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, S. R. (2004). Runaway Fires, Smoke-haze Pollution, and Unnatural Disasters in Indonesia. *Geographical Review*, 94(1), 55-79.
- Ali, T., Paton, D., Buergelt, P. T., Smith, J. A., Jehan, N., & Siddique, A. (2021). Integrating Indigenous Perspectives and Community-Based Disaster Risk Reduction: A Pathway for Sustainable Indigenous Development in Northern Pakistan, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 59, 102263.
- Artia, F. A., Sunoko, K., & Wibowo, A. K. W. (2021). Konsep Kawasan Superblok Tanggap Bencana Di Jakarta Utara, *Senthong*, 4(1).
- Atanga, R. A., & Tankpa, V. (2021). Climate Change, Flood Disaster Risk and Food Security Nexus in Northern Ghana. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 706721.
- Bukhori, I. (2018). *Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Chmutina, K., & Von Meding, J. (2019). A dilemma of language: "Natural disasters" in academic literature. *International Journal of Disaster Risk Science*, 10, 283-292.
- Colven, E. (2017). Understanding the Allure of Big Infrastructure: Jakarta's Great Garuda Sea Wall Project. *Water Alternatives*, 10(2).
- Dean, M. M. (2009). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*.
- Dombrowsky, W. R. (1995). Again and again: Is a disaster what we call "disaster"? Some conceptual notes on conceptualizing the object of disaster sociology. *International Journal of Mass Emergencies & Disasters*, 13(3), 241-254.
- Dranseika, V. (2016). Moral responsibility for natural disasters. *Human Affairs*, 26(1), 73-79.
- Dwirahmadi, F., Rutherford, S., Phung, D., & Chu, C. (2019). Understanding the operational concept of a flood-resilient urban community in Jakarta, Indonesia, from the perspectives of disaster risk reduction, climate change adaptation, and development agencies. *International journal of environmental research and public health*, 16(20), 3993.
- Fiisabiilillah0F, D. F., & Maulana1F, A. (2016). Feeding the megacity: Challenges to achieve food security in Jakarta. *Journal of Regional and City Planning*, 27(3), 208-218.
- Gibb, C. (2018). A critical analysis of vulnerability. *International journal of disaster risk reduction*, 28, 327-334.
- Gould, K. A., Garcia, M. M., & Remes, J. A. (2016). Beyond "natural-disasters-are-not-natural": the work of state and nature after the 2010 earthquake in Chile. *Journal of Political Ecology*, 23(1), 93-114.
- Gustafsson, J. (2017). *Single case studies vs. multiple case studies: A comparative study*. Retrieved from: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064378/FULLTEXT01.pdf>
- Heijmans, A. (2009, February). The social life of community-based disaster risk reduction: origins, politics and framing. In *World Conference of Humanitarian Studies, Groningen* (pp. 3-8).
- James, H., & Paton, D. (2015). Social capital and the cultural contexts of disaster recovery outcomes in Myanmar and Taiwan. *Global Change, Peace & Security*, 27(2), 207-228.
- Kronfeldner, M. (2018). *Divide and conquer: The authority of nature and why we disagree about human nature*. Oxford University Press.

- Kumagai, Y., Edwards, J., & Carroll, M. S. (2006). Why are natural disasters not “natural” for victims?. *Environmental Impact Assessment Review*, 26(1), 106-119.
- Linverando, E., Sentosa, G. S., & Iskandar, A. (2022). Analisis Potensi Likuifaksi dan Penurunan Pada Areal Reklamasi Yang Berlokasi di Jakarta Utara. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 723-734.
- Madjid, M. M., Bangun, E., Risma, H. J., & Wilopo, W. (2024). Increasing Community Preparedness In Facing Floods Disaster In Jakarta City. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 3(6).
- Octavianti, T., & Charles, K. (2018). Disaster capitalism? Examining the politicisation of land subsidence crisis in pushing Jakarta’s seawall megaproject. *Water Alternatives*, 11(2).
- Octavianti, T., & Charles, K. (2019). The evolution of Jakarta’s flood policy over the past 400 years: The lock-in of infrastructural solutions. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(6), 1102-1125.
- Puspita, N. Y. (2022). Good governance and flood management in Jakarta. In *Urban Climate Resilience* (pp. 277-304). Edward Elgar Publishing.
- Putri, S. K., Lestari, F., & Wardhany, M. S. (2021). Analisis tingkat risiko kebakaran Wilayah Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 1032-1038.
- Roberts, P. (2009). An Unnatural Disaster. *Administration & Society*, 41(6), 763-769.
- Smith, N. (2006). There’s no such thing as a natural disaster. *Understanding Katrina: perspectives from the social sciences*, 11.
- Smith, Z. A. (2017). *Hydro-Social Systems in Jakarta: A Critique of Flood Management Policy* (Master's thesis, National University of Singapore (Singapore)).
- Sunarharum, T. M., Sloan, M., & Susilawati, C. (2021). Collaborative approach for community resilience to natural disaster: Perspectives on flood risk management in Jakarta, Indonesia. In *Sustainability in Energy and Buildings 2020* (pp. 275-284). Springer Singapore.
- Supendi, P., Widiyantoro, S., Rawlinson, N., Yatimantoro, T., Muhari, A., Hanifa, N. R., ... & Damanik, R. (2023). On the potential for megathrust earthquakes and tsunamis off the southern coast of West Java and southeast Sumatra, Indonesia. *Natural Hazards*, 116(1), 1315-1328.
- Surtiari, G. A. K., Djalante, R., Setiadi, N. J., & Garschagen, M. (2017). Culture and community resilience to flooding: Case study of the urban coastal community in Jakarta. *Disaster risk reduction in Indonesia: Progress, challenges, and issues*, 469-493.
- Van Voorst, R. (2016). Formal and informal flood governance in Jakarta, Indonesia. *Habitat International*, 52, 5-10.
- Van Voorst, R. (2016). *Natural hazards, risk and vulnerability: Floods and slum life in Indonesia*. Routledge.
- Wijaya, H. V., & Husin, D. (2022). Konsep Rumah Susun Mikro Di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(2), 1635-1646.
- Wiryomartono, B., & Wiryomartono, B. (2020). Capitalist Agenda behind the Seawall development in Jakarta Bay, Indonesia: The marginalization of urban poor. *Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia: Power, Architecture, and Urbanism*, 223-245.